

ABSTRAK

Pemulihan aset memerlukan beberapa langkah atau tahapan, termasuk memperoleh informasi atau intelijen, mengumpulkan bukti, melacak aset, membekukan dan menyita aset, melakukan tindakan hukum, menegakkan perintah atau keputusan pengadilan, dan akhirnya menyerahkan aset kepada negara. Karena fakta bahwa kejahatan transnasional seringkali melampaui batas negara, mungkin sulit bagi pemerintah untuk mengejar mereka yang bertanggung jawab melakukannya. Ini dikarenakan negara yang berbeda memiliki undang-undang yang berbeda yang mungkin tidak selalu mudah diterapkan. Perjanjian internasional, seperti *Mutual Legal Assistant (MLA)*, yang merupakan jenis utama perjanjian internasional yang dipergunakan antar negara menjadi dasar perjanjian pengembalian aset, merupakan alat penting untuk mencapai pengembalian aset yang efektif yang berasal dari kegiatan kriminal dari luar negeri. Dalam praktiknya, pelaksanaan MLA masih belum optimal dikarenakan negara termohon memiliki hak untuk menolak. Penelitian ini difokuskan untuk menekankan pada aspek teknis pelaksanaan kerja sama bahwasanya upaya yang dilaksanakan bisa melalui jalur informal. Penelitian ini merupakan hasil penelitian deskriptif normatif yang dilaksanakan dengan cara studi kepustakaan serta wawancara terhadap narasumber terkait. Berdasarkan hasil penelitian penulis, selain ketentuan tersebut, ada beberapa ketentuan internasional lainnya dimana ada pada *United Nations Convention Against Corruption, 2003* dimana dapat diadopsi serta diterapkan pada perundang-undangan guna mengefektifkan kerja sama pengembalian aset, salah satunya melalui jalur informal jejaring pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui mengenai mekanisme kerja sama dalam pengembalian aset hasil tindak pidana siber lintas negara melalui jalur informal jejaring pemulihan aset CARIN antara Indonesia dan Belanda pada tahun 2021.

Kata kunci: pemulihan aset, pengembalian aset, kejahatan transnasional, jalur informal, jaringan pemulihan aset

ABSTRACT

Asset recovery requires several steps or stages, including obtaining information or intelligence, gathering evidence, tracking assets, freezing and seizing assets, pursuing legal action, enforcing court orders or decisions, and finally turning assets over to the state. Due to the fact that transnational crimes often transcend national borders, it can be difficult for governments to pursue those responsible for committing them. This is because different countries have different laws which may not always be easy to implement. International agreements, such as Mutual Legal Assistant (MLA), which are the main type of international agreement used between countries as the basis for asset recovery agreements, are an important tool for achieving effective return on assets stemming from criminal activity from abroad. In practice, the implementation of MLA is still not optimal because the respondent country has the right to object. This research is focused on emphasizing the technical aspects of the implementation of cooperation that efforts can be carried out through informal channels. This research is the result of normative descriptive research carried out by means of literature studies and interviews with relevant informants. Based on the results of the author's research, apart from these provisions, there are several other international provisions contained in the United Nations Convention Against Corruption, 2003 which can be adopted and implemented in legislation to make asset recovery cooperation effective, one of which is through informal asset recovery networks. This study aims to find out about the mechanism of cooperation in returning assets resulting from cross-border cybercrime through the informal channel of the CARIN asset recovery network between Indonesia and the Netherlands in 2021.

Keywords: *asset recovery, asset return, transnational crime, informal channel, asset recovery interagency network*